

Strategi Penyebaran Informasi Publik Melalui Video Digital: Proses Penyuntingan dan Standar Konten di Diskominfo Prov Sumatera Barat

¹Raihana Salsabillah, Marlina², Rini Asmara³

^{1,2,3} Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat

^{1,2,3} Jl. Prof. Dr. Hamka, Kota Padang, 25131

e-mail: raihanasalsabillah2@gmail.com

ABSTRACT

Introduction. The dissemination of public information through digital video at the Office of Communication, Informatics, and Statistics (Diskominfo) of West Sumatra Province focuses on the editing process and the content standards applied. This study is important because digital video has become a primary medium for government communication in delivering information to the public in a fast, accurate, and transparent manner in the digital era.

Data Collection Methods. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with three informants who were directly involved in the video content production process.

Data Analysis. Data were analyzed through stages of observation, interviews, data reduction, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the workflow of the video editing process.

Results and Discussion. The findings indicate that the video editing process at Diskominfo is conducted based on Standard Operating Procedures (SOPs) that refer to public information disclosure regulations and government communication ethics. The editing stages include footage selection, message structuring, voice-over recording, subtitle insertion, and multi-level review by relevant officials as a form of information gatekeeping. Technical obstacles such as audio quality issues, field conditions, and visual synchronization problems are addressed through editing techniques and content adjustments.

Conclusion. The video production strategy implemented by Diskominfo is effective in enhancing the accuracy, accessibility, and effectiveness of public information dissemination. Future studies are recommended to examine audience perceptions of government video content.

Keywords: Public Information; Editing; Digital Video

ABSTRAK

Pendahuluan. Penyebaran informasi publik melalui video digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada proses penyuntingan serta standar konten yang diterapkan. Penelitian ini penting karena video digital menjadi medium utama komunikasi pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan di era digital.

Metode penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga narasumber yang terlibat langsung dalam proses produksi konten video.

Data analisis. Analisis penelitian ini melalui tahapan observasi, wawancara, reduksi data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai alur kerja penyuntingan video.

Hasil dan Pembahasan. Studi ini menunjukkan bahwa proses editing video di Diskominfo dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada regulasi keterbukaan informasi publik serta etika komunikasi pemerintah. Tahapan penyuntingan meliputi seleksi footage, penyusunan alur pesan, perekaman voice-over, penambahan subtitle, serta pemeriksaan berlapis oleh pejabat terkait sebagai bentuk gatekeeping informasi. Hambatan teknis seperti kualitas audio, kondisi lapangan, dan ketidaksinkronan visual dapat diatasi melalui teknik editing dan penyesuaian konten.

Kesimpulan dan Saran. Strategi produksi video yang diterapkan Diskominfo efektif dalam meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan efektivitas penyebaran informasi publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji persepsi audiens terhadap konten video pemerintah.

Kata Kunci: Informasi Publik; Penyuntingan; Video Digital

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola komunikasi publik, khususnya dalam penyebaran informasi oleh lembaga pemerintah. Jika sebelumnya informasi publik banyak disalurkan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, kini media berbasis internet dan digital menjadi saluran utama yang dinilai lebih cepat, fleksibel, dan menjangkau khalayak luas (Abdul et al., 2022). Dalam konteks ini, video digital muncul sebagai medium komunikasi yang strategis karena mampu menggabungkan unsur visual dan audio secara simultan. Video digital dipahami sebagai konten audiovisual yang diproduksi, disunting, dan disebarluaskan melalui *platform* digital seperti situs web, media sosial, dan layanan berbagi video, bukan melalui media fisik atau penyiaran tradisional (Masindo, 2018). Sementara itu, informasi publik merujuk pada data, keterangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keterbukaan informasi (Hasan, 2016). Kombinasi antara video digital dan informasi publik memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan secara lebih komunikatif, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Prasetya, 2020).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan video digital sebagai media informasi publik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kualitas penyuntingan (*editing*) serta penerapan standar konten menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Proses *editing* yang kurang terstruktur dapat berdampak pada rendahnya kualitas audio-visual dan ketidakjelasan alur informasi, sementara standar konten yang tidak konsisten berisiko menimbulkan kesalahan informasi atau pelanggaran etika komunikasi pemerintahan (Darumaya et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang sistematis agar video digital benar-benar berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang efektif. Sejumlah

penelitian sebelumnya telah membahas komunikasi pemerintah di era digital dan penggunaan media daring sebagai sarana penyebaran informasi (Anggraini et al., 2022), namun pembahasan yang secara khusus mengkaji proses internal penyuntingan video serta standar konten pada level pemerintahan daerah masih relatif terbatas.

Penelitian ini semakin kuat jika dikaitkan dengan tingginya tingkat penggunaan internet di Indonesia. Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai 80,66% dari total penduduk, atau sekitar 229,4 juta jiwa dari 284,4 juta penduduk Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan penyebaran informasi publik secara digital. Namun, tingkat penggunaan internet tersebut tidak merata di seluruh wilayah. Pulau Jawa mencatat persentase tertinggi sebesar 84,69%, sedangkan Pulau Sumatra berada pada angka rata-rata 77,12%. Di tingkat provinsi, Sumatera Barat menunjukkan tingkat penggunaan internet sebesar 76,45% pada tahun 2025, meningkat dari 75,14% pada tahun sebelumnya. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang pemanfaatan media digital sangat besar, strategi penyebaran informasi publik tetap perlu mempertimbangkan konteks lokal, infrastruktur, serta karakteristik audiens di masing-masing daerah (Sari & Winduwati, 2023).

Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) memiliki peran strategis sebagai pengelola utama informasi publik. Di Provinsi Sumatera Barat, Diskominfo bertanggung jawab atas produksi dan distribusi berbagai konten informasi, termasuk video digital, agar masyarakat memperoleh informasi resmi secara cepat dan akurat. Namun demikian, mekanisme internal yang berkaitan dengan proses penyuntingan video, pengendalian kualitas, serta penerapan standar konten baik dari aspek teknis, substansi informasi, maupun kepatuhan terhadap kebijakan publik belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur ilmiah. Padahal, aspek-aspek tersebut menentukan kredibilitas dan efektivitas komunikasi pemerintah di ruang digital.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada strategi penyebaran informasi publik melalui video digital di lingkungan Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada proses penyuntingan dan standar konten yang diterapkan. Penelitian ini tidak hanya menelaah hasil akhir berupa konten video, tetapi juga mengkaji praktik internal yang meliputi perencanaan, produksi, penyuntingan, hingga distribusi informasi kepada publik (Anggoroningtyas & Adha, 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk

menggambarkan secara komprehensif bagaimana strategi tersebut dijalankan serta bagaimana tantangan teknis dan nonteknis diatasi dalam praktik.

Penelitian ini memiliki originalitas pada fokus kajian yang menghubungkan praktik penyuntingan video, standar konten, dan konteks pemerintahan daerah secara empiris. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya mengisi kekosongan literatur mengenai proses internal produksi video informasi publik di tingkat provinsi, khususnya di Sumatera Barat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan komunikasi publik digital maupun sebagai rujukan praktis bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyebaran informasi publik di era digital.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemanfaatan video digital sebagai media penyebaran informasi publik semakin menguat seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di era digital. Video digital dipandang efektif karena mampu menggabungkan unsur visual, audio, dan teks secara simultan, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya informatif tetapi juga lebih mudah dipahami dan menarik perhatian publik. Dalam konteks pemerintahan, penggunaan video digital bukan sekadar pilihan teknis, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menjamin akses informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas produksi dan pengelolaan konten menjadi faktor penting dalam efektivitas penyebaran informasi melalui media digital. Penelitian Halim et al., (2025) menegaskan bahwa penerapan teknik penyuntingan lanjutan (*advanced editing*) dalam produksi video mampu meningkatkan kualitas visual, kejelasan pesan, dan daya tarik audiens. Temuan ini menguatkan asumsi dalam penelitian bahwa proses penyuntingan bukan sekadar tahap akhir produksi, melainkan bagian strategis yang menentukan apakah pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh khalayak. Meskipun penelitian Halim et al. berfokus pada video edukasi dan bukan pada informasi publik pemerintahan, data mengenai pentingnya pengaturan alur visual, pemilihan *footage*, dan pengolahan audio menjadi landasan teknis yang relevan untuk memahami praktik penyuntingan video dalam konteks Diskominfo.

Aspek aksesibilitas informasi publik melalui media digital diperkuat oleh penelitian Putri & Widaswara, (2025), yang menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial oleh instansi pemerintah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jangkauan dan kemudahan akses

informasi bagi masyarakat. Temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena menegaskan bahwa strategi penyebaran informasi publik tidak dapat dilepaskan dari karakteristik media digital dan perilaku audiens. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada pengelolaan platform dan interaksi pengguna, sementara kualitas konten khususnya proses produksi dan penyuntingan video belum menjadi fokus utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang menghubungkan aksesibilitas informasi dengan kualitas internal produksi konten video.

Penelitian (Khalisah et al., 2025) memberikan gambaran empiris mengenai proses produksi video pemerintah melalui platform *Instagram Reels*, mulai dari tahap perencanaan, perekaman, penyuntingan, hingga distribusi. Data ini memperkuat kerangka pemikiran penelitian bahwa produksi video digital merupakan proses berlapis yang melibatkan berbagai pertimbangan teknis dan komunikatif. Namun demikian, fokus penelitian Khalisah et al. masih terbatas pada satu jenis platform media sosial dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana standar konten diterapkan sebagai mekanisme pengendalian kualitas dan akurasi informasi publik. Padahal, standar konten memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap sesuai dengan etika komunikasi pemerintahan.

Dari perspektif kelembagaan, penelitian Hudaya & Amalia, (2025) menekankan pentingnya strategi humas dalam menjaga transparansi, akurasi, dan kredibilitas informasi publik di era digital. Hal ini memperkuat penelitian bahwa pengelolaan informasi publik harus didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Meskipun penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas media video digital, penekanan pada konsistensi pesan, keakuratan informasi, dan kepercayaan publik menjadi dasar konseptual bagi penerapan standar konten dalam produksi video informasi publik di lingkungan Diskominfo.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa media digital termasuk video telah diakui sebagai sarana strategis dalam penyebaran informasi publik. Namun, sebagian besar penelitian masih memisahkan pembahasan antara aspek teknis produksi konten, strategi pengelolaan media, dan prinsip keterbukaan informasi. Penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, khususnya pada konteks pemerintahan daerah, masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

Penelitian ini berpijak pada pemahaman informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik serta wajib disampaikan secara akurat, jelas, dan etis

kepada masyarakat. Video digital dalam penelitian ini diposisikan sebagai media informasi publik yang membutuhkan pengelolaan profesional, baik dari sisi teknis maupun substansi. Proses penyuntingan video dipahami sebagai tahapan strategis untuk menyusun alur pesan, meningkatkan kualitas audio-visual, dan menyesuaikan konten dengan karakteristik audiens. Sementara itu, standar konten berfungsi sebagai pedoman normatif dan teknis untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan melalui video digital sesuai dengan regulasi, etika, dan kebutuhan informasi publik.

Dengan mengaitkan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan proses penyuntingan dan standar konten sebagai dua elemen kunci dalam strategi penyebaran informasi publik melalui video digital. Fokus pada praktik internal Diskominfo Provinsi Sumatera Barat memungkinkan penelitian ini untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kualitas penyuntingan dan penerapan standar konten berkontribusi terhadap peningkatan akurasi, aksesibilitas, dan efektivitas informasi publik. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya melanjutkan kajian sebelumnya, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengelolaan video digital sebagai media informasi publik di tingkat pemerintahan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai strategi penyebaran informasi publik melalui video digital, khususnya terkait proses penyuntingan dan standar konten di Diskominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena melalui penelusuran makna, pengalaman, serta praktik yang dilakukan para pelaksana komunikasi publik di instansi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi video, seperti pejabat struktural Diskominfo. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih spesifik, dengan 3 informan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap alur kerja produksi video serta dokumentasi berupa arsip video, pedoman penyuntingan, dan standar konten yang digunakan instansi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman, sehingga informasi yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan akurat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyebaran informasi publik melalui video digital di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dibangun melalui pengelolaan proses penyuntingan yang terstruktur dan penerapan standar konten yang ketat. Video digital dipahami bukan sekadar sebagai produk visual, melainkan sebagai medium komunikasi publik yang membawa pesan kebijakan dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan produksi dan penyuntingan diarahkan untuk menjamin akurasi informasi, kejelasan pesan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan etika komunikasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara, proses penyuntingan video di Diskominfo Sumbar dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Penginputan Siaran Pers atau Konten Internal Bidang IKP. Informan 1 menegaskan bahwa SOP tersebut tidak hanya mengatur teknis peliputan, tetapi juga mengendalikan alur penyajian dan penyebaran informasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap sesuai kaidah jurnalistik dan dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk penyandang disabilitas. Informan 1 menyatakan bahwa, *“SOP ini menjadi pegangan utama agar konten video yang diproduksi tetap informatif, tidak keluar dari konteks kebijakan, dan aman secara regulasi.”* Temuan ini menunjukkan bahwa standar konten berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan bagaimana informasi publik dikonstruksi sebelum disampaikan kepada audiens.

Mekanisme penyuntingan video di Diskominfo juga dilakukan melalui proses pengawasan berjenjang. Setelah tahap editing awal oleh editor, video diperiksa oleh subkoordinator, kemudian diteruskan kepada kepala bidang dan kepala dinas untuk persetujuan akhir. Informan 1 menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan pada aspek teks, sinkronisasi *voice-over*, judul, serta kesesuaian visual dengan konteks informasi. *“Revisi dilakukan untuk memastikan kutipan tidak terpotong dan tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat,”* ungkapnya. Pola kerja ini memperlihatkan bahwa setiap aktor internal menjalankan fungsi penyaringan informasi sebelum konten dipublikasikan. Praktik tersebut sejalan dengan konsep *gatekeeping*, di mana informasi tidak langsung disebarkan, tetapi terlebih dahulu melalui proses seleksi dan pengendalian agar pesan yang sampai kepada publik tetap akurat dan bertanggung jawab. Temuan ini yang menegaskan bahwa *gatekeeping* dalam media digital berperan penting

dalam mencegah misinformasi dan menjaga kredibilitas informasi publik (Rizka Mufidah, 2025).

Dari sisi teknis produksi, Informan 2 menjelaskan bahwa alur penyuntingan dimulai dari penerimaan dan pengelompokan *footage* hasil peliputan, kemudian dilanjutkan dengan penyeleksian gambar yang relevan dan penyusunan alur video sesuai *rundown* kegiatan. Informan 2 menyatakan bahwa, “*Setiap footage ditonton ulang supaya pesan yang disampaikan ke masyarakat tetap runtut dan sesuai dengan kegiatan yang diliput.*” Kutipan pimpinan daerah atau OPD ditempatkan sebagai pesan utama, sementara *footage* pendukung digunakan untuk memperjelas konteks. Penggunaan teks, *subtitle*, dan *voice-over* menjadi strategi penting untuk memastikan informasi mudah dipahami oleh audiens dengan latar belakang yang beragam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala teknis seperti gangguan audio, *footage* goyang, cuaca, keterbatasan peralatan, serta situasi lapangan yang tidak terduga merupakan bagian dari dinamika produksi video digital. Namun, kendala tersebut tidak serta-merta menurunkan kualitas informasi. Informan 2 menuturkan bahwa masalah teknis biasanya diatasi melalui penyuntingan ulang, penggunaan *voice-over*, atau penyesuaian visual agar pesan tetap tersampaikan dengan jelas. Hal ini menegaskan bahwa proses penyuntingan tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga kejelasan dan kelengkapan informasi publik.

Penyusunan pesan dalam video mempertimbangkan bagaimana audiens menerima dan memaknai informasi. Informan 3 menjelaskan bahwa video yang informatif harus memiliki kerangka yang jelas dan mampu menjembatani pesan dari komunikator kepada masyarakat. “*Kalau alurnya tidak jelas, pesan bisa salah ditangkap audiens dan justru menimbulkan masalah,*” ujarnya. Praktik ini sejalan dengan teori Stuart Hall, yang memandang pesan media sebagai hasil proses *encoding* oleh produsen pesan dan *decoding* oleh audiens. Dalam konteks ini, Diskominfo berupaya mengendalikan proses *encoding* melalui penyuntingan yang terstruktur agar makna yang diterima audiens berada pada posisi dominan atau sejalan dengan maksud pemerintah. Konstruksi pesan visual sangat menentukan bagaimana audiens menafsirkan informasi yang diterimanya (Patma & Prihatin, 2025).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya tahap evaluasi pascapublikasi melalui analisis umpan balik audiens. Informan 3 menegaskan bahwa *feedback* masyarakat digunakan sebagai dasar evaluasi konten selanjutnya dan sebagai indikator awal potensi misinformasi atau

krisis komunikasi. “Kalau ada respons negatif atau kesalahpahaman, itu jadi bahan evaluasi agar ke depan lebih hati-hati,” jelasnya. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi penyebaran informasi publik melalui video digital tidak berhenti pada tahap publikasi, tetapi berlanjut pada pengelolaan respons publik sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi penyebaran informasi publik melalui video digital di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dibangun melalui integrasi antara proses penyuntingan yang sistematis, penerapan standar konten berbasis regulasi, serta mekanisme *gatekeeping* internal. Penyuntingan video berfungsi sebagai alat pengendalian pesan, sementara standar konten menjadi landasan normatif untuk menjamin transparansi, akurasi, dan aksesibilitas informasi. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas video digital sebagai media informasi publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi terutama oleh tata kelola internal dan kesadaran institusional dalam mengelola makna informasi sebelum diterima oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi penyebaran informasi publik melalui video digital di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara terstruktur dan mengikuti standar komunikasi publik yang baik. Proses produksi video, mulai dari perencanaan, pengumpulan data visual, penyuntingan, hingga publikasi, dilaksanakan sesuai prinsip komunikasi pemerintahan yang menekankan akurasi, transparansi, dan inklusivitas. Mekanisme penyuntingan yang menerapkan pengawasan berjenjang menunjukkan adanya proses *gatekeeping* yang efektif dalam memastikan kualitas dan kebenaran informasi sebelum disebarkan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan elemen visual seperti *subtitle*, *voice-over*, dan desain grafis yang konsisten memperkuat pesan yang disampaikan dan mencerminkan penerapan prinsip multimedia yang relevan untuk meningkatkan pemahaman audiens. Diskominfo juga menerapkan standar etika dan regulasi yang berlaku, sehingga konten video yang diproduksi tidak hanya informatif tetapi juga aman dan sesuai norma hukum. Secara keseluruhan, strategi penyebaran informasi publik melalui video digital di instansi ini telah mampu mendukung kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses, sekaligus memperkuat citra pemerintah sebagai lembaga yang terbuka dan responsif terhadap tuntutan komunikasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdjul, F., D Massie, J. D., Mandagie, Y., Manajemen, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh Content Marketing, Search Engine Optimization dan Social Media Marketing terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Feb Unsrat Di E-Commerce Sociolla. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(3), 225–236. <https://doi.org/10.35794/EMBA.V10I3.41752>
- Anggraini, C., Denny,) ;, Ritonga, H., Kristina, L., Syam, M., & Kustiawan, W. (2022). Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 1(3), 337–342.
- Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei*. <https://survei.apjii.or.id/>
- Darumaya, B. A., Maarif, S., Toruan, T., Swastanto, Y., Doktorat, P., & Strategi, F. (2023). Pemikiran Potensial Ancaman Perang Siber di Indonesia: Suatu Kajian Strategi Pertahanan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 299–324. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1418>
- Halim, M. Z. I., Faradillah, M. A., N., D. F., Hakim, F. N., Firdaus, A. N., & Aribowo, D. (2025). Pemanfaatan Fitur – Fitur Multimedia (Advanced Editing Pada Aplikasi Capcut) untuk Produksi Vidio Edukasi Bertemakan Ketahanan Pangan Polri. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/DXY3GR53>
- Hasan, K. (2016). *Konstruksi Realitas dalam Media Massa*.
- Anggoroningtyas, N., & Adha, S. (2024). Penggunaan Influencer dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen pada Aplikasi Belanja Online Tiktok. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 1(5), 110–116. <https://doi.org/10.59971/JIMBE.V1I5.216>
- Khalisah, N., Renny Soelistiyowaty, R., & Vokasi, S. (2025). Proses Produksi Video Instagram Reels untuk Diseminasi Informasi Pemerintah: Studi Kasus @Diskominfo bdg. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1298–1308. <https://doi.org/10.63447/JIMIK.V6I2.1420>
- Masindo, A. A. (2018). Strategi Public Relations Detikcom dalam Meningkatkan Brand Loyalty. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43880>

- Hudaya, N. M., & Amalia, D. (2025). Strategi Humas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 177–181. <https://doi.org/10.54371/JIIP.V8I1.6761>
- Patma, O. F., & Prihatin, S. D. (2025). Analisis Resepsi Stuart Hall tentang Poster Silang Pinjam Antar Perpustakaan Sepatu Jolifa. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 5(1), 52–65. <https://doi.org/10.24821/JAP.V5I1.14287>
- Prasetya, M. R. (2020). Self-presentation dan kesadaran privacy micro-influencer di instagram. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(1), 239. <https://doi.org/10.25139/JSK.V4I1.2301>
- Putri, P. N. M., & Widaswara, R. Y. (2025). Pengelolaan Media Sosial Oleh Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dalam Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Publik. *Tutur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(01), 47–56. <https://ojs.yp-jagadhita.or.id/index.php/TJIK/article/view/12>
- Rizka Mufidah, F. (2025). *Strategi Gatekeeping Akun Media Instagram @Ponorogo.Update pada Pemberitaan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Jurnalisme Warga Edisi Bulan Januari 2025*.
- Sari, W. P., & Winduwati, S. (2023). Analisa Media Sosial dan Komunikasi Promosi pada Pemengaruh Makro Di Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 102–113. <https://doi.org/10.24912/JMIEB.V7I1.22804>